



**Gerakan Dakwah sebagai Sistem Kaderisasi Partai Keadilan
Sejahtera (Studi pada Dewan Pengurus Wilayah PKS Provinsi
Jawa Tengah)**

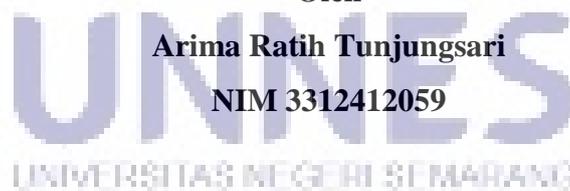
SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial S1
pada Program Studi Ilmu Politik**

Oleh

Arima Ratih Tunjungsari

NIM 3312412059



JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

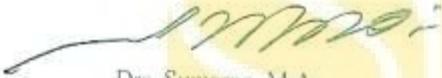
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Drs. Sumarno, M.A.
NIP. 195610101985031003


Puji Lestari, S.Pd., M.Si.
NIP. 197707152001122008

Mengetahui:
Ketua Jurusan PKn


UNNES
Drs. Tijan, M.Si.
NIP. 196211201987021001
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :



Penguji I

Nooroehmat Isdaryanto, S.S., M.Si
NIP. 197112042010121001

Penguji II

Penguji III

Drs. Sumarno, M.A.
NIP. 195610101985031003

Puji Lestari, S.Pd., M.Si.
NIP. 197707152001122008



PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan dari jiplakan karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 18 Agustus 2016



Arima Ratih Tunjungsiari
NIM. 3312412059



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Tunjungsari, Arima Ratih. 2016. Gerakan Dakwah Sebagai Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (Studi pada Dewan Pengurus Wilayah PKS Provinsi Jawa Tengah). Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I Drs. Sumarno, M.A Pembimbing II Puji Lestari, S.Pd., M.Si.

Kata kunci : Partai Politik, Kaderisasi, Gerakan Dakwah

Partai politik manapun membutuhkan proses kaderisasi dalam melanjutkan regenerasi kepemimpinan partainya, setiap anggota calon kader harus mengikuti proses seleksi untuk menjadi kader. Kemudian setelah lulus seleksi, anggota tersebut harus mengikuti proses pengkaderan yang dilakukan oleh partai politik dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan politik. Melalui sistem kaderisasi tersebut ketua partai atau pengurus partai mempunyai penilaian terhadap kader-kader yang nantinya akan direkomendasikan untuk menjadi calon yang mewakili partainya dalam jabatan-jabatan pemerintahan.

Permasalahan penelitian ini adalah 1) bagaimanakah sistem kaderisasi yang dilakukan oleh DPW PKS Provinsi Jawa Tengah melalui gerakan dakwah pada kadernya sehingga menghasilkan kader yang berkualitas dan solid terhadap partainya? 2) faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam kaderisasi oleh DPW PKS Provinsi Jawa Tengah? 3) solusi apa yang dilakukan DPW PKS Provinsi Jawa Tengah untuk menghadapi kendala dalam sistem kaderisasi ?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian meliputi data primer dan sekunder. dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai politik yang menyatakan diri sebagai partai dakwah, hal ini sebagaimana juga diterapkan dalam proses kaderisasinya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berciri dan bersifat keagamaan pelaksanaan kaderisasinya dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang biasanya berhubungan partai, yaitu dengan pelatihan-pelatihan, pengajian, ta'lim rutin, berkemah, seminar, dauroh, serta pertemuan lainnya. Pengkaderan partai PKS yaitu dilakukan secara resmi oleh kepengurusan partai dari ranting sampai pusat, pengkaderan formal ini merupakan sarana pembinaan kader sekaligus perjenjangan bagi mereka yang akan berimplikasi pada distribusi peran dan posisi struktural di PKS. Pelatihan yang dilakukan oleh PKS dilakukan secara berjenjang atau hirarkis yang pertama *ta'rif* yaitu mencakup proses pengenalan. Kedua, *taqwin* yaitu pengembangan karakter dan internalisasi ajaran Islam. Ketiga, *tanfidz* yaitu tahap realisasi kerja dakwah.

Output yang diharapkan dari gerakan tarbiyah tersebut adalah lahir kader yang memiliki kemampuan dakwah dengan kapasitas yang memadai.

Saran yang diberikan: 1) sebaiknya partai politik selalu terbuka dengan masyarakat dan selalu menjalin komunikasi yang baik untuk meminimalisir kecurigaan-kecurigaan maupun ketidakpercayaan masyarakat dengan partai politik 2) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) senantiasa bersikap profesional dalam berbagai bidang yang ditekuni terutama meningkatkan peran dan fungsinya sebagai partai politik, meningkatkan kualitas para kader, serta memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menjadi anggota partai agar bisa berpartisipasi aktif dalam dunia politik.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Selalu percaya bahwa kerja keras dan do'a yang tak pernah putus akan menjawab harapan kita
2. Berhenti cemas atas penilaian orang lain atas kita, dan mulailah berbuat baik sebanyak mungkin

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho -Nya.
- ❖ Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, dan doanya yang tanpa lelah.
- ❖ Adikku Ichwan Fahmi dan M. Ichbal Banuarta serta keluarga besarku menjadikan alasan yang membuat saya tetap melangkah maju dan terus berjuang tanpa putus asa ketika keadaan membuat saya berhenti melangkah..
- ❖ Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik 2012, bahagia rasanya bersama dengan kalian.
- ❖ Almamaterku tercinta

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas dukungan, saran, kritik serta segala bentuk bantuan yang diberikan selama penulis menempuh perkuliahan maupun dalam proses pembuatan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Moh Solehatul Mustofa, M.A Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.
4. Bapak Drs. Sumarno, M.A Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Puji Lestari, S.Pd., M.Si Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah membekali ilmu dan motivasi penyusun untuk terus belajar.
7. Bapak H. Kamal Fauzi selaku Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai (DPW) Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ikhsan

Mustofa, A.Md selaku Sekertaris Dewan Pengurus Wilayah Partai (DPW) Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Tengah, Bapak Thohari, S.Pdi selaku Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Tengah, Bapak Agus Bidang Kesekretariatan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Tengah, Bapak Febru Bidang Pemuda Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Tengah dan pengurus lainnya di Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jawa Tengah, yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.

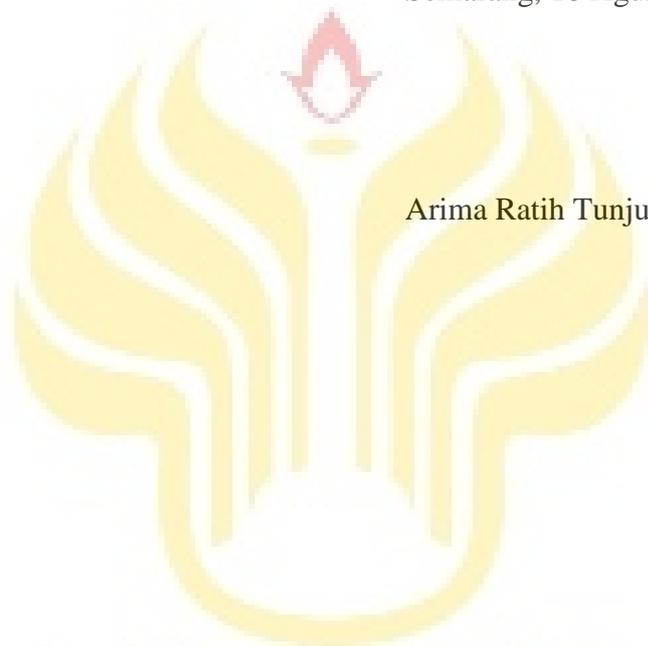
8. Bapak, Ibukku tercinta terimakasih atas dukungan, doanya, motivasinya yang tanpa lelah dan tiada henti serta keluarga yang telah memberikan cinta, kasih sayang, semangat, serta doa kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku Aulia, Amina, Wida, Yuli, Sani, Tika, Hesti, Azizah, Ummah, Firna, Anggun dan Luwes yang telah senantiasa memberikan semangat, kasih sayang, serta doa kepada penulis.
10. Teman-temanku Ilmu Politik 2012 yang selalu memberikan bantuan dan motivasi selama masa perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih

jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 18 Agustus 2016



Arima Ratih Tunjungsari

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
SARI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Batasan Istilah	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoretis	15
1. Partai Politik.....	15

2. Rekrutmen Politik.....	24
3. Sistem Kaderisasi.....	30
4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS).....	37
5. Gerakan Dakwah	46
B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Relevan	54
C. Kerangka Berfikir	56
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Latar Penelitian	58
B. Fokus Penelitian	59
D. Sumber Data	60
E. Alat dan Tehnik Pengumpulan Data	61
F. Uji Validitas Data	64
G. Tehnik Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	71
1. Gambaran Umum Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah.....	71
a. Tinjauan Umum Tentang Dewan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tenga.....	71
b. Visi dan Misi Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah.....	73
c. Program Kerja Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah	76

2. Gerakan Dakwah sebagai Sistem Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah	81
3. Faktor Kendala Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah dalam Kaderisasi	107
4. Solusi yang dilakukan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah untuk Mengatasi Kendala dalam Sistem Kaderisasi.....	110
B. Pembahasan.....	112
1. Gerakan Dakwah sebagai Sistem Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah.....	112
2. Faktor Kendala Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah dalam Kaderisasi	120
3. Solusi yang dilakukan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah untuk Mengatasi Kendala dalam Sistem Kaderisasi	121
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perolehan Suara PKS Provinsi Jawa Tengah Pemilu Legislatif 1999-2004	6
Tabel 2. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Relevan.....	57
Tabel 3. Jumlah kader DPW PKS Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2015	71



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Skema Kerangka Berfikir	57
Bagan 2. Proses Analisis Data	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Partai Keadilan Sejahtera	44
Gambar 2. Peta Data DPW PKS Provinsi Jawa Tengah	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3. Instrumen Penelitian

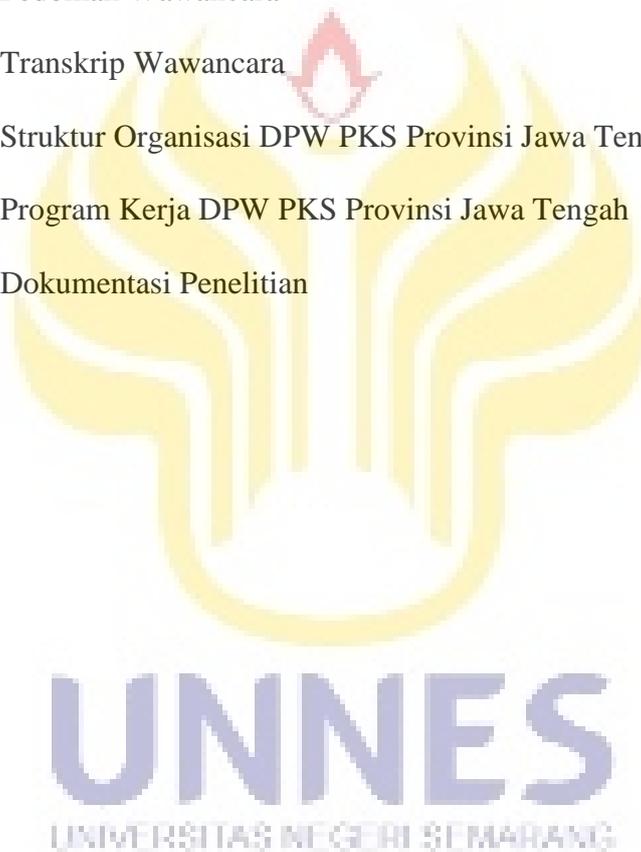
Lampiran 4. Pedoman Wawancara

Lampiran 5. Transkrip Wawancara

Lampiran 6. Struktur Organisasi DPW PKS Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 7. Program Kerja DPW PKS Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Karena dengan demokrasi kekuasaan berada di tangan rakyat, dan rakyatlah yang memegang kekuasaan tidak mungkin menjalankan kekuasaan tersebut secara langsung, melainkan melalui lembaga perwakilan yang dibentuk dengan pemilihan umum. Di negara yang menganut demokrasi terutama di Indonesia menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili melihat masyarakat Indonesia yang sangat pluralitas dengan berbagai ragam suku, kebudayaan, adat istiadat, serta kepercayaan. Tujuannya agar wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan mencerminkan ragam dukungan yang ada di masyarakat sehingga dalam pengambilan keputusan tidak ada kelompok yang ditinggalkan.

Keberadaan demokrasi tanpa adanya partai politik adalah sebuah situasi kekuasaan tanpa legitimasi. Dengan demikian, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai serta cita-cita yang sama, tujuan dari kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik, merebut kekuasaan,

serta mempertahankan kedudukan politik dengan cara konstusional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, 2008:404).

Partai politik merupakan penghubung yang sangat strategis antara pemerintah dengan yang diperintah. Partai politik dibentuk sebenarnya untuk melaksanakan demokrasi di suatu negara karena partai politik sebagai sarana warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memperjuangkan kepentingannya untuk kelompoknya. Dengan semakin tingginya peran dan fungsi suatu partai politik, akan semakin berkualitaslah demokrasi. Karena begitu pentingnya peran partai politik, maka sudah selayaknya jika partai politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi yang sehat dan efektif.

Partai politik harus mengamalkan demokrasi dengan memberi stimuli para kadernya agar memberikan yang terbaik pada Negara dan bangsa yang pada hakekatnya membangun mentalitas juara untuk memenangkan setiap kompetisi dengan melakukan yang terbaik yang bisa dilakukannya (Subiyanto, 2014:85). Demi terwujudnya suatu demokrasi yang baik partai politik harus mempunyai kader-kader partai yang berkualitas, unggul, kuat serta solid melalui proses rekrutmen dan kaderisasi politik, karena melalui kader partai yang akan maju dalam proses pemilu sebagai wakil rakyat partai politik haruslah berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, dengan mendudukkan kader-kadernya menjadi pejabat pemerintah sbagai wakil rakyat, sehingga dapat turut serta dalam mengambil dan menentukan keputusan politik berupa kebijakan sesuai

dengan kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan proses rekrutmen yang berarti proses pengisian jabatan-jabatan politik pada lembaga-lembaga politik, termasuk jabatan dalam birokrasi atau administrasi negara dan partai-partai politik. Rekrutmen politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, karena melalui proses ini orang-orang yang akan menjalankan sistem politik ditentukan.

Partai politik menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi politik, pada fungsi ini seseorang mengalami proses politik yaitu menyeleksi, menjanging dan melatih calon-calon pemimpin yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang dapat menyalurkan aspirasi dan mengemban amanat dari masyarakat. Dan menjadi pemimpin yang tidak hanya untuk kepentingan partainya tapi juga untuk kepentingan rakyat. Masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepemimpinan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri (Budiardjo, 2008: 408).

Menurut Firmanzah (2007:92) mengemukakan bahwa partai politik harus melaksanakan fungsi rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan cara melakukan seleksi terhadap orang-orang yang akan menjadi pengurus partai politik harus diubah dan lebih berorientasi pada masalah bangsa dan negara. Selain itu, proses pengkaderan dan muatan-muatan politis yang diberikan kepada mereka harus diubah. Perlu

ditanamkan kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari bangsa dan negara, dan bahwa dipundak mereka terdapat segudang permasalahan bangsa dan negara yang harus diselesaikan.

Selain melakukan rekrutmen partai politik perlu melakukan pendidikan politik kepada kader-kader politiknya. Sistem kaderisasi ini sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan politik, tidak hanya yang terkait dengan visi, misi, dan strategi partai politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara (Firmanzah: 2008:71)

Dengan mempunyai kader-kader politik yang berkualitas, partai politik tidak akan kesulitan dalam menentukan pemimpinnya dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan kader yang berkompentensi sebagai calon pemimpin politik di pemerintahan serta diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintah sebagai pemimpin yang baik dan amanah yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Maka dari itu setiap partai politik pasti mempunyai pola atau sistem rekrutmen dan kaderisasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem pemikiran dan ideologi politik yang dianut masing-masing partai politik. Pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi meliputi segala aktifitas partai politik dimulai dari penerimaan anggota, penyeleksian kader, pembinaan kualitas kader sampai dengan penempatan/penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategis.

Reformasi pasca otoritarisme Orde Baru, telah menghidupkan kembali demokrasi. Pertumbuhan partai politik mengalami kemajuan yang

pesat banyak partai-partai politik yang mulai dibentuk dan mengikuti pemilu, karena partai politik merupakan pilar dari demokrasi yang ada di dalam suatu negara modern. Banyak partai yang berdiri setelah Orde Baru, diantaranya Partai Keadilan.

Lahirnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak bisa lepas dari peranan Partai Keadilan. Pada pemilu 1999 Partai Keadilan menduduki peringkat ke tujuh diantara 48 partai politik peserta pemilu. Hasil ini tidak mencukupi untuk mencapai ketentuan *electroral threshold*, sehingga tidak bisa mengikuti pemilu 2004 kecuali berganti nama dan lambang dari yang mulanya bernama Partai Keadilan berubah menjadi Partai Keadilam Sejahtera (PKS). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai yang berbasis Islam dengan struktur partai yang kuat dan dukungan yang solid bahkan militan jika dibandingkan dengan representasi partai islam manapun termasuk PPP dan PBB. PKS di Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan, pencapaian PKS signifikan sebagai partai politik yang berbasis Islam.

Dalam pelaksanaan pemilu Legislatif 9 April 2014, partai PKS berhasil mendapatkan suara 8.480.204 atau 6,79 persen ditingkat nasional, sedangkan di Jawa Tengah PKS mendapatkan kursi di DPRD sebanyak 10, sedangkan di tingkat daerah di daerah Jawa Tengah PKS mendapatkan kursi sebanyak 133. Hasil dari pemilu ini lebih banyak dari pemilu sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan eksistensi Partai Keadilan Sejahtera di masyarakat yang telah berhasil menjadi partai yang dipercayai oleh

sebagian besar masyarakat walaupun belum menempati pada posisi teratas. Dalam hal ini tentunya DPW PKS Provinsi Jawa Tengah telah melakukan fungsinya dalam melakukan rekrutmen kader politik dengan baik dan benar (www.republika.co.id diunduh pada 30 November 2015). Berikut adalah perolehan suara PKS Provinsi Jawa Tengah Pemilu legislatif 1994-2014 :

**Tabel 1. Perolehan Suara PKS Provinsi Jawa Tengah
Pemilu Legislatif 1999-2004**

Tahun	Jumlah PKS	Kursi PKS
Pemilu 1999	137.770	1
Pemilu 2004	858.283	7
Pemilu 2009	1.075.378	10
Pemilu 2014	1.147.546	10

Sumber : DPW PKS Provinsi Jawa Tengah

Perolehan pemilu selalu meningkat, hal ini tidak lepas dari perjuangan kader PKS yang selalu berusaha untuk memenangkan suara dalam pemilihan umum, mereka selalu mengatakan bahwa kemenangan partai adalah kemenangan Islam, mereka yakin jika partainya menang, akan menjadi kemenangan Islam. Inilah yang menjadi motivasi mereka, mereka terus menerus melakukan gerakan dakwahnya, kader PKS mengaku sebagai gerakan dakwah yang optimis akan datang kemenangan Islam. Sejalan dengan tujuan yang terdapat dalam dakwah, maka dakwah dapat disinergikan kedalam kegiatan politik, karena hakekat dakwah dan politik memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa kehidupan yang lebih

baik. Politik bagi kader PKS merupakan suatu kebutuhan dan keniscayaan, karena politik berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Berbeda dengan partai politik lainnya, PKS memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang sistematis dan metodik. Kaderisasi ini memiliki fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader, dan fungsionaris partai. Fungsi-fungsi ini dijalankan secara terbuka melalui infrastruktur kelembagaan partai yang tersebar dari tingkat pusat hingga tingkat ranting. Fungsionalisasi berjalan sepanjang waktu selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai, khususnya dalam bidang penyiapan sumber daya manusia dalam partai. Fenomena yang menarik pada PKS yang tidak dimiliki partai Islam lain adalah adanya proses kaderisasi yang dilakukan oleh LDK (Lembaga Dakwah Kampus) anak-anak muda Tarbiyah yang berhasil membangun basis politik dikalangan mereka. Pengkaderan dikalangan PKS ada tiga jenis yaitu: Tarbiyah, pengkaderan oleh underbow PKS dan pengkaderan formal kepartaian (Rahmat, 2008:237-238).

Awal mulanya PKS berasal dari gerakan dakwah para mahasiswa dan mahasiswi di kampus yang dikenal dengan gerakan tarbiyah dengan mentransformasikan nilai-nilai Islam. Partai politik akan menjadi kuat jika mempunyai kader-kader politik yang solid satu sama lain, keberhasilan ini tak dapat dilepaskan dengan konsep kaderisasi yang diterapkan dengan baik dan terarah. Bagi PKS dakwah merupakan sebuah keharusan, hal ini dapat dilihat dalam PKS dalam melakukan kaderisasi yang baik dan

terarah dalam proses *tarbiyah*, *halaqah*, atau *liqo*. Dengan metode tarbiyah ini digunakan PKS untuk melakukan kaderisasi dan memberikan pendidikan politik kepada kader-kader politiknya.

Kaderisasi belum menjadi prioritas bagi partai politik di Indonesia. Selama masa Orde Baru hingga era reformasi, mayoritas partai politik masih mengandalkan figur, ketenaran bahkan dinasti, untuk meraih dukungan dalam pemilihan umum (Pemilu). Banyak partai politik di Indonesia saat ini yang menerapkan kaderisasi instan dengan merekrut tokoh-tokoh yang dianggap populer atau mapan secara finansial untuk memperoleh suara terbanyak dalam suatu pemilihan umum misalnya partai politik merekrut selebritis untuk diajukan dalam pemilihan umum.

Kebijakan kaderisasi instan lebih banyak menghasilkan kader yang pragmatis. Rendahnya kesadaran akan kualifikasi inilah yang akan menimbulkan partai untuk memaksakan diri dalam mengajukan figur yang tidak berkualitas dalam pemilihan umum baik ditingkat daerah maupun nasional. Hal tersebut sangatlah merugikan partai dan masyarakat dalam jangka panjang namun tidak semua partai politik mempunyai sistem kaderisasi yang jelas. Tingkat pengetahuan dan pemahaman kader dari partai politik tentang visi, misi, dan ideologi partai politik masih dirasa sangat kurang. Dalam paham demokrasi, sistem politik, dan tata kelola penyelenggaraan negara terasa timpang antara kader partai besar dan partai kecil. Maka itu dapat dikatakan bahwa partai politik belum bisa melaksanakan fungsinya dengan baik untuk memberikan pendidikan

politik bagi kader dan konstituennya. Padahal masa depan sebuah partai terletak ditangan para kader dengan dukungan konstituennya.

Adanya hal tersebut, maka setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 ini, PKS segera melakukan langkah tahapan pasca pemilu khususnya dalam rangka penguatan solidaritas internal kader. Hal ini merujuk pada keputusan Presiden PKS untuk melakukan pembenahan pasca pemilu 2014. Pembenahan yang dilakukan salah satunya adalah penguatan kader. Berdasarkan keputusan tersebut, DPW PKS Jateng menyiapkan program strategis dengan mencanangkan program kaderisasi setahun, dimana kaderisasi menjadi ujung tombak utama dan menjadi program prioritas partai. Program ini bertujuan untuk mengembalikan platform dakwah sebagai penguatan pondasi kader. Sebagai partai dakwah tentu dakwah menjadi hal yang utama, sehingga ta'lim rutin menjadi penting dengan melibatkan ustadz internal PKS dalam melaksanakan program ini. Dakwah dalam PKS bukan hanya sekedar dakwah, seperti mengadakan pengajian di Masjid tapi berdakwah dalam arti luas, seperti peduli dengan lingkungan sekitarnya, berhubungan dengan orang lain, dan membantu sesama.

Kaderisasi PKS melalui gerakan dakwah merupakan proses dimana setiap kader yang akan menjadi anggota PKS diwajibkan memahami tentang visi-misi partai, platform partai, tujuan dari partai politik, selain itu kader juga mampu untuk berdakwah sebagaimana PKS merupakan partai yang menyatakan diri sebagai partai dakwah. Para kader PKS lebih

dituntut untuk mementingkan kemampuan dakwahnya daripada kemampuan untuk beranalisis dan membentuk suatu jaringan politik yang telah ada. Proses kaderisasi yang dilakukan oleh PKS berfokus pada pembentukan moral dari SDM kader internalnya yang kemudian dialokasikan pada gerakan untuk membenahi moralitas masyarakat, sebagai bagian dari solusi permasalahan bangsa. Format kaderisasi yang berbasis gerakan dakwah ini sudah berjalan dengan baik, dakwah yang dilakukan oleh PKS dapat diterima oleh masyarakat. Hubungan antara dakwah dan kaderisasi sangat menarik diteliti, maka penelitian akan mengkaji tentang “Gerakan Dakwah Sebagai Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (Studi Pada Dewan Pimpinan Wilayah PKS Provinsi Jawa Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, sehingga perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimanakah sistem kaderisasi yang dilakukan oleh DPW PKS Provinsi Jawa Tengah melalui gerakan dakwah pada kadernya sehingga menghasilkan kader yang berkualitas dan solid terhadap partainya?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam kaderisasi oleh DPW PKS Provinsi Jawa Tengah?

- c. Solusi apa yang dilakukan DPW PKS Provinsi Jawa Tengah untuk menghadapi kendala dalam sistem kaderisasi

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui tentang sistem kaderisasi yang dilakukan oleh DPW PKS Provinsi Jawa Tengah melalui gerakan dakwah pada kadernya sehingga menghasilkan kader yang berkualitas dan solid terhadap partainya
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam kaderisasi oleh DPW PKS Provinsi Jawa Tengah
- c. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan DPW PKS Provinsi Jawa Tengah untuk menghadapi kendala dalam sistem kaderisasi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Manfaat secara teoritis, yaitu :
 1. Bagi pihak lain : penelitian ini sebagai salah satu kajian ilmu politik dan sangat erat dengan partai politik dan diharapkan mampu

memberikan kontribusi pemikiran tentang sistem kaderisasi partai politik

2. Bagi peneliti : untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan bagi peneliti khususnya tentang sisten kaderisasi suatu partai politik

b. Manfaat secara praktis, yaitu :

1. Bagi pihak lain: penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi pembelajaran bagi para individu dalam melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang politik.

2. Bagi peneliti : penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir penulis dalam penelitian ini dan memperkaya ilmu yang dimiliki, serta melihat penerapan konsep-konsep ilmu politik dalam kehidupan praktis masyarakat.

E. Batasan Istilah

1. Gerakan Dakwah

Dakwah merupakan usaha untuk mengajak manusia kepada Allah untuk menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Dakwah ini ditujukan untuk seluruh manusia sehingga masuk Islam dan dapat mengemban nilai-nilai Islam tersebut.

Gerakan dakwah yaitu sebuah upaya yang mengajak segmen masyarakat untuk melakukan perbaikan kualitas hidup menuju ke tingkat yang lebih tinggi dalam kemajuan manusia. Untuk tujuan itu

gerakan dakwah harus memiliki kejelasan agenda dan program-program reformasinya. Agenda dan program tersebut kemudian di perjuangkannya melalui pihak yang berkepentingan (Abu Ridha, 2004:51).

2. Sistem kaderisasi

Sistem adalah kesatuan seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Jika salah satu bagian tidak dapat menjalankan tugasnya maka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang telah terwujud akan berjalan dengan baik.

Kaderisasi merupakan kegiatan pembinaan dan pelatihan kader agar mempunyai kualitas yang baik, solid, serta mempunyai komitmen terhadap organisasi, sehingga kader tersebut diharapkan dapat meneruskan keberlangsungan partai di masa akan datang.

Sistem kaderisasi merupakan serangkaian kegiatan penyiapan, membina serta mengasuh sumber daya manusia secara terdidik atau secara berkesinambungan agar menghasilkan kader-kader yang mampu memimpin dengan baik yang dipersiapkan untuk mengganti pemimpin yang lama, serta membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik (Roni Tamara S dalam e-Journal Ilmu Pemerintahan, 2014, 2 (1) : 1829-1841).

3. Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sosial yang disingkat PKS, partai ini didirikan di Jakarta pada hari sabtu, tanggal 9 Jumadil ‘Ula 1423 bertepatan dengan 20 April 2002. Partai PKS merupakan partai yang berasaskan Islam yang bercirikan bersih peduli dan profesional (AD /ART PKS Pasal 1 dan Pasal 2).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoretis

1. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu sarana yang menghubungkan antara pemerintah dengan rakyat. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiardjo, 2008:404).

Carl J. Fredric mengartikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil (Budiardjo, 2008:404).

Sigmund Neumann dalam karangannya modern political parties mengemukakan definisi sebagai berikut : partai

politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda (Budiardjo, 2008:404).

Dalam bukunya *Ekonomic Et Societie* Marx Weber memberikan defenisi tentang partai politik, menurutnya partai politik adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut (Firmanzah, 2008:66).

Menurut Undang-undang UU No.2 Tahun 2008, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.

Partai politik menurut PKS yang dikatakan sesuai dalam Islam dianggap sebagai sarana yang berupaya menyadarkan masyarakat untuk berjuang bersama melanjutkan kehidupan Islam. Partai politik dalam sudut pandang Islam harus berideologi Islam, pengambilan dan penetapan ide-ide, hukum-hukum dan pemecahan problematika harus berdasarkan syariat

Islam serta metode operasionalnya mencontoh metode yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW (Qodir, 2013:158).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas mengenai partai politik, partai politik mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah negara terutama di negara dengan menerapkan sistem demokrasi. Secara sederhana partai politik merupakan *representation of ideas* yang harus ada dalam kehidupan politik modern yang demokrasi. Partai politik sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada *representation of ideas* secara ideal dimaksudkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat atau tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimasi.

b. Fungsi Partai Politik

Secara garis besar peran dan fungsi partai politik dapat di bedakan menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi, di sini peran dan fungsi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki

tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik (Firmanzah, 2008:67).

Fungsi, hak, dan kewajiban sebuah partai politik telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Berikut merupakan fungsi partai politik menurut UU No.2 Tahun 2008 Pasal 12:

- a) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar
- b) Menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat.
- d) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- e) Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan
- f) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam menyelenggarakan demokrasi partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi (Budiardjo, 2008:405-409), sebagai berikut :

a) Sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik mempunyai fungsi salah satunya sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara pemerintah dengan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada masyarakat dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan rakyat.

Menurut Sigmund Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.

b) Sebagai sarana sosialisasi politik.

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Proses sosialisasi politik berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Proses ini dapat diperoleh secara sengaja melalui

pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai sarana sosialisasi politik, seperti sekolah, partai politik, dan pemerintah. Partai politik dalam sistem politik dapat menyelenggarakan proses sosialisasi politik pada masyarakat.

c) Sebagai sarana rekrutmen politik

Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.

d) Sebagai sarana pengatur konflik

Potensi konflik akan selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen dengan berbagai macam suku bangsa, sosial-ekonomi, maupun agama. Peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada melalui cara berdialog

dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan pada musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan kesediaan berkompromi diantara para wakil rakyat, yang berasal dari partai-partai politik.

c. Klasifikasi Partai Politik

Suatu negara dengan sistem demokrasi tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan partai politik sebagai pilar demokrasi. Partai politik sebagai atribut suatu negara dan mempunyai fungsi yang erat kaitannya dengan jalannya pemerintahan. Partai politik merupakan infrastruktur politik yang ada di masyarakat, partai politik merupakan organisasi non pemerintahan yang mempunyai tujuan tertentu dan berusaha untuk mencapai tujuan dengan cara menduduki suatu pemerintahan melalui pemilihan umum.

Klasifikasi partai dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum dapat dibagi dalam dua jenis yaitu partai massa dan partai kader. Menurut Haryanto, partai politik dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara

umum dapat dibagi mejadi dua kategori, yaitu (dalam buku Adrianus dan Efriza dkk, 2005:567) :

- a) Partai massa, dengan ciri utamanya adalah jumlah anggota atau pendukung yang banyak. Meskipun demikian, partai jenis ini memiliki program walaupun program tersebut agak kabur dan terlampau umum. Partai jenis ini cenderung menjadi lemah apabila golongan atau kelompok yang tergabung dalam partai tersebut mempunyai keinginan untuk melaksanakan kepentingan kelompoknya. Selanjutnya, jika kepentingan kelompok tersebut tidak terakomodasi, kelompok ini akan mendirikan partai sendiri.
- b) Partai kader, kebalikan dari partai massa, partai kader mengandalkan kader-kadernya untuk loyal. Pendukung partai ini tidak sebanyak partai massa karena memang tidak mementingkan jumlah, partai kader lebih mementingkan disiplin anggotanya dan ketaatan dalam berorganisasi. Doktrin dan ideologi partai harus tetap terjamin kemurniannya. Bagi anggota yang menyeleweng, akan dipecat keanggotaannya.

Partai politik pada umumnya dapat di kalsifikasikan menurut tiga kriteria (Kantaprawira, 2002:67).

- a) Berdasarkan komposisi dan keanggotaanya secara umum partai politik dibagi dalam dua jenis, yaitu partai massa dan

partai kader. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, sedangkan partai kader mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya.

b) Berdasarkan sifat dan orientasinya. Klasifikasi ini membagi partai menjadi dua jenis, yaitu pertama, partai perlindungan umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (sekalipun organisasi di tingkat local sering cukup ketat), disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Kedua, partai ideologi atau partai azas biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat.

c) Berdasarkan sistem kepartaian. Secara konvensional, dikenal tiga sistem klasifikasi sistem kepartaian. Pertama, sistem satu partai (*one party system*). Dalam suatu negara hanya ada satu partai, atau dalam suatu negara sebenarnya terdapat partai-partai lain, namun karena terlalu kecilnya partai-partai tersebut, hanya satu partai yang dominan dalam politiknya. Kedua, sistem dwi partai, yaitu dalam suatu negara terdapat dua partai. Dalam sistem ini biasanya partai yang menang dalam pemilihan umum menduduki

posisi pemerintahan (berkuasa). Sebaliknya partai yang kalah menjadi oposisi setia (*loyal opposition*) terhadap kebijakan partai yang berkuasa. Ketiga sistem banyak partai (*multy party system*). Dimaksudkan bahwa di suatu Negara terdapat banyak partai, tidak terpengaruh berapa jumlah partai dan partai mana yang berkuasa.

2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan salah satu cara untuk menyeleksi anggota partai politik yang berbakat berkualitas guna dipersiapkan untuk mengisi suatu jabatan dalam pemerintahan.

Menurut Budiardjo rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik yang berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian

partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin (Budiardjo, 2008:408).

Pendapat lainnya menurut Ramlan Surbakti mengemukakan pengertian rekrutmen politik yaitu seleksi dan pemelihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin (Surbakti, 2010:118).

Philip Althof dan Michael Rush dalam bukunya Pengantar Sosiologi Politik (2000) menyebutkan bahwa Perekrutan orang-orang yang menjalankan kekuasaan politik, bisa dilakukan dengan menduduki jabatan politik seperti perdana menteri atau presiden, anggota pemerintah atau menjabat gubernur negara bagian, anggota Dewan Kotapraja setempat atau Walikota, ataupun dengan menjadi anggota dalam birokrasi nasional atau birokrasi lokal dan menjadi pegawai negeri sipil, administrator negara bagian atau pejabat pemerintah lokal. Demikian pula, perhatian tersebut jadi meluas sampai tertuju pada personil partai yang tengah berkuasa dan hirarki pemerintah dalam masyarakat totaliter.

Menurut Sastroatmodjo, rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan

pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu (Sastroatmodjo, 1995:121)

Rekrutmen atau sistem rekrutmen, dengan adanya sistem ini nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi sama serta memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut (Firmazah, 2008:70). Dengan demikian rekrutmen merupakan proses untuk merekrut anggota baru yang berkualitas oleh organisasi politik untuk dijadikan pengurus atau dicalonkan untuk menduduki suatu jabatan di pemerintahan. Proses rekrutmen dapat dilakukan secara terbuka yaitu dimana setiap warga negara yang telah memenuhi syarat bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam suatu pemerintahan. Kemudian proses rekrutmen dilakukan secara tertutup hanya memberi kesempatan pada orang-orang tertentu atau pihak tertentu. Derajat keterbukaan rekrutmen akan ditentukan oleh derajat pelaksanaan demokrasi dalam sebuah negara. Adapun beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik menurut Fadillah Putra (dalam Iyahudin, 2012:20) yaitu :

- a. *Partisan* merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menuduki jabatan strategis.
- b. *Compartmentalization* merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang.
- c. *Immediate survival* merupakan proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
- d. *Civil service reform* merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau tinggi.

Sistem rekrutmen politik memiliki keragaman, menurut Philip Althoff dan Michael Rush terhadap beberapa model yang dapat digunakan dalam rekrutmen politik (Komarudin Sahid, 2011:132-134) yaitu sebagai berikut :

- a. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan
 Ujian dan latihan merupakan bentuk rekrutmen paling umum biasanya dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan birokrasi dan administrasi. Terkadang dilakukan juga oleh partai politik dalam bentuk pendidikan kader partai yang dilakukan melalui latihan. Cara ini tentu memiliki banyak keragaman yang diantaranya mempunyai implikasi penting bagi perekrutan politik.

b. Seleksi melalui penyortiran

Merupakan salah satu metode tertua yang digunakan untuk memmperkokoh kedudukan pemimpin-pemimpin politik adalah dengan penyortiran atau penarikan undian. Metode ini digunakan di Yunani Kuno.

c. Seleksi melalui rotasi atau giliran

Suatu metode yang sama, yang dibuat untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu adalah dengan giliran atau rotasi. Metode ini dilakukan pada sistem yang menerapkan format kepemimpinan kolektif atau dalam bentuk presidium atau pada masyarakat yang memiliki pengelompokan poliyik yang sangat kental. Sehingga untuk menghindari konflik atau menjaga stabilitas politik baik itu di partai politik atau pemerintahan Negara, maka perlu dibuat sistem rotasi atau giliran.

d. Seleksi atau perebutan kekuasaan

Merupakan salah satu metode perekrutan lama yang terdapat pada suatu sistem politik. Seleksi melalui perebutan kekuasaan ini biasanya dilaksanakan dengan jalan kekerasan atau menggunakan ancaman. Akibat nyata dari cara ini adalah penggantian para pemegang jabatan politik dan perubahan-perubahan dalam personel birokrasi. Cara ini biasanya

menimbulkan hasil yang lebih lambat terutama bila berlangsung dalam masyarakat yang kompleks dan sangat maju.

e. Seleksi dengan cara patronage

Patronage adalah suatu sistem yang sampai saat ini masih dilakukan di banyak negara berkembang, dahulu sistem ini terdapat di Amerika Serikat dan Inggris. Pada abad ke 19, patronage merupakan bagian dari suatu sistem penyuapan dan sistem korupsi yang rumit. Sistem ini sebagian metode yang cukup mapan untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik melalui berbagai taraf pengontrolan terhadap hasil-hasil pemilihan umum, sebagian lagi merupakan sarana bagi perekrutan politik, karena untuk masuk anggota parlemen hampir selalu dapat dipastikan melalui sistem patronage.

f. Seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah

Berbeda dengan sistem patronage, seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah merupakan suatu faktor kontekstual yang vital dari sebagian besar sistem-sistem politik.

g. Seleksi melalui *coopsi*

Suatu metode yang lebih terbatas dimana pemimpin-pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu. *Coopsi* meliputi pemilihan seseorang ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada.

3. Sistem Kaderisasi

a. Pengertian Kaderisasi

Kaderisasi merupakan kebutuhan internal yang harus dilakukan oleh suatu organisasi, dengan adanya kaderisasi akan memunculkan suatu proses perputaran dan pergantian kader-kader sebelumnya, dengan adanya kaderisasi yang baik akan memunculkan kader-kader yang berkualitas dan mempunyai kemampuan dalam manajemen organisasi, kapabilitas dan mempunyai komitmen demi keberlanjutan organisasi di masa depannya untuk meneruskan cita-cita, visi, misi, serta tujuan dari organisasi tersebut seperti halnya partai politik juga merupakan organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut (Firmanzah, 2008:66).

Kaderisasi merupakan bagian dari rekrutmen politik, tanpa adanya kaderisasi sebuah partai politik rasanya sangat sulit dibayangkan untuk dapat berkelanjutan kedepannya dan melakukan tugas-tugas dan tujuan partai politik dengan baik dan dinamis. Melalui kaderisasi, partai politik melakukan proses penyiapan sumber daya manusia agar kelak mempunyai kader-kader yang berkualitas, kapabilitas, dan komitmen yang tinggi terhadap partai politik yang kemudian akan diajukan dalam

suatu pemilihan umum sebagai wakil rakyat dan dapat menjadi pemimpin yang mampu membangun membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan.

Fungsi rekrutmen sebagai salah satu bagian dari partai politik dimana bertujuan untuk menyediakan kader-kader berkualitas untuk ditempatkan di lembaga-lembaga legislatif seperti DPR maupun DPRD. Setiap partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian partai politik dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri (Budiardjo, 2008:408).

Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya (Assiddiqy, 2006: 160).

Menurut Andre Layo Ala (Fadillah Putra, 2003), melalui kaderisasi diajarkan berbagai macam nilai politik yang hidup dan berlaku dalam sistem politik, hal ini dimaksudkan bahwa kaderisasi itu adalah menyambung kelangsungan hidup suatu organisasi, sehingga individu-individu yang akan direkrut

sesuai dengan kepentingan organisasi/lembaga, oleh karena itu pengkaderan anggota-anggota dimaksud sebagai persiapan untuk dijadikan calon sesuai dengan tujuan organisasi/lembaga.

Sumber daya manusia sebagai calon anggota atau calon kader dalam partai politik akan menjalani proses seleksi yang disebut kaderisasi berupa pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan agar memahami platform partai, sejarah perjuangan partai, arah perjuangan partai dan strategi perjuangan politik yang digunakan oleh partai serta memiliki militansi yang tinggi pada partai politik tersebut. Salah satu caranya, yang merupakan faktor kunci yaitu dengan penanaman ideologi. Dengan ini maka, kaderisasi merupakan proses penyiapan anggota baru yang nantinya akan menggantikan perjuangan anggota yang lama untuk meneruskan estafet dalam kelanjutan perjuangan partai ke depan. Kader-kader di persiapkan dengan memberikan nilai-nilai yang mencerminkan identitas lembaga, karena nilai-nilai tersebut merupakan suatu yang memang dibutuhkan untuk menyiapkan kader untuk melaksanakan tujuan partai politik.

b. Sistem Kaderisasi Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan pendidikan politik. Dalam UU No.2 Tahun 2011 disebutkan bahwa salah satu tujuan partai politik yaitu sebagai

sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan politik tersebut tidak hanya diberikan kepada masyarakat namun juga para kader maka inilah yang disebut dengan sistem kaderisasi. Melalui sistem ini akan melahirkan kader-kader yang berkualitas dan layak untuk dapat mengisi jabatan publik.

Partai politik selain mempunyai peran dalam merekrut regenerasi partai politik, di dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem pendidikan dan kaderisasi kader-kader politiknya. Sistem kaderisasi ini sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan politik, tidak hanya tentang visi, misi, sejarah, serta strategi partai politik tetapi juga terkait dengan permasalahan bangsa dan negara. Selain memberi pengetahuan tentang partai politik dalam suatu sistem kaderisasi juga memberikan keterampilan dan keahlian dalam politik untuk menghasilkan kader-kader yang berkualitas serta solid. Sistem kaderisasi perlu disertai dengan sistem transparan yang memberikan jaminan akses kepada semua kader yang memiliki potensi. Perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh organisasi politik. Kader dan calon pemimpin harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang

sehat dan transparan itu. Karena, dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas tinggi (Firmanzah, 2008:70-71).

Pada sistem kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik ada empat hal pokok dalam berlangsungnya proses kaderisasi yaitu pelaku kaderisasi (subjek), sasaran kaderisasi (objek), mekanisme (proses) dan kurikulum materi kaderisasi. Pelaku kaderisasi adalah organ parpol yang difungsikan menyiapkan dan melaksanakan kaderisasi. Sasaran kaderisasi merupakan individu-individu yang dipersiapkan untuk meneruskan visi dan misi partai politik. Mereka pula yang akan memperjuangkan tercapainya tujuan organisasi di masa depan. Mekanisme dan materi biasanya diatur berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga parpol dan peraturan internal partai.

Suatu negara yang menjalankan sistem demokrasi membutuhkan partai-partai yang mampu mengendalikan para kader yang ditugaskan di berbagai jabatan-jabatan politik dan tentu kader-kader politik telah dipersiapkan dengan kualifikasi, kualitas dan kompetensi yang tinggi. Apabila ada partai politik yang lalai membangun sistem kaderisasi bagi kader-kadernya berarti telah menyimpang dari tugas dan kewajiban

konstitusionalnya karena telah menempatkan kadernya di jabatan politik diisi oleh kader kagetan. Untuk mendapatkan kader-kader dengan kriteria yang dibutuhkan maka partai politik harus mendesain sistem kaderisasi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan partai untuk menjawab tantangan kebutuhan. Berikutnya, untuk menjamin keberlanjutan kaderisasi, maka sistem kaderisasi ini butuh dilembagakan segera formal dalam satu lembaga khusus yang dalam logika struktur fungsi, format kelembagaannya akan mengikuti fungsi-fungsi yang dibebankan dalam sistem kaderisasi berikut. Sistem kaderisasi bisa disusun berdasarkan model hirarkhi /perjenjangan, spesialisasi/ keahlian atau campuran/kombinasi dari keduanya. Model ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan fungsi-fungsi partai yang akan dijalankan di tiap wajah partai. Selain itu masing-masing model akan memiliki implikasi, misalnya, bagi pengelolaan struktur organisasi partai baik untuk bagan organisasi yang sifatnya vertikal (struktur vertikal organisasi) atau yang bersifat horisontal (struktur keahlian/spesialisasi dari organisasi), sitem karir, dan sebagainya.

Model hirarkhi adalah penjenjangan kaderisasi berdasarkan pelapisan yang bertahap, bertingkat atau piramidal. Ini misalnya bisa disusun dengan melakukan penjenjangan kaderisasi tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut atau

penyebutan lainnya. Rasionalisasi penjenjangan model hirarkhi ini bisa dilakukan karena alasan penjenjangan sebagai akibat pentahapan materi kaderisasi (materi bersifat piramidal) dan penjenjangan sebagai akibat pentahapan karir dalam organisasi (karir bersifat piramidal).

Model Spesialisasi/keahlian yang harus dimiliki oleh seorang kader untuk dapat terlibat secara aktif sebagai aktivis partai politik. Model ini didasarkan pada rasionalisasi adanya beragam fungsi dalam pengelolaan partai yang membutuhkan keahlian khusus sehingga materi-materi kaderisasi lebih menonjolkan sisi keahlian tertentu yang harus dimiliki kader partai. Saat bersamaan, model berbasis spesialisasi ini juga akibat dari upaya penciptaan sistem karir yang lebih bersifat menyebar, artinya disesuaikan dengan karir yang hendak ditempuh oleh seorang kader partai.

Proses kaderisasi ada dua macam yaitu kaderisasi informal dan kaderisasi formal. Kaderisasi informal merupakan proses kaderisasi yang dilakukan secara tidak terencana lebih sering dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, kaderisasi informal ini sudah diajarkan semenjak dini baik dilingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan disekitar tempat. Kaderisasi formal merupakan proses kaderisasi yang dilakukan secara sadar dan sengaja biasanya mengikuti peraturan tertentu dipenuhi

dengan materi yang bersifat nilai atau menginternalisasikan hal-hal yang bersifat normatif.

Dalam proses kaderisasi terdapat dua persoalan penting yaitu:

- a. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan kemampuan baik keterampilan maupun kemampuan.
- b. Kemampuan untuk menyediakan stok kader atau sumber daya manusia untuk organisasi terutama dikhususkan untuk kaum muda (Koirudin, 2004:114).

Sistem kaderisasi merupakan serangkaian kegiatan penyiapan, membina serta mengasuh sumber daya manusia secara terdidik atau secara berkesinambungan agar menghasilkan kader-kader yang mampu memimpin dengan baik yang dipersiapkan untuk mengganti pemimpin yang lama, serta membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Dan untuk menciptakan suatu sistem kaderisasi yang baik diperlukan manajemen parpol yang baik terlebih dahulu. Manajemen parpol yang baik dapat dilihat dari kepengurusan, pengelolaan keuangan, dan program kerja partai parpol.

4. Partai Keadilan Sejahtera

a. Sejarah berdirinya PKS

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di

Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il. PKS merupakan partai yang menjadikan Islam menjadi asas partai baru ini, tercatat lebih dari 50 pendiri partai ini, diantaranya adalah Hidayat Nur Wahid, Luthfi Hasan Ishaq, Salim Segar Aljuari dan Nur Mahmudi Ismail. Nur Mahmudi Ismail menjabat sebagai pimpinan partai keadilan, sedangkan Hidayat Nur wahid menjabat sebagai ketua majelis pertimbangan partai. Partai ini dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998 di masjid Al Azhar kebayoran Baru Jakarta dengan dihadiri oleh sekitar 50.000 massa (Setiawan dan Nainggolan, 2004:302).

Pada pemilu 1999 Partai Keadilan menduduki peringkat ke tujuh diantara 48 partai politik peserta pemilu. Hasil ini tidak mencukupi untuk mencapai ketentuan *electroral threshold*, sehingga tidak bisa mengikuti pemilu 2004 kecuali berganti nama dan lambang dari yang mulanya bernama Partai Keadilan berubah menjadi Partai Keadilam Sejahtera (PKS).

PKS lahir dari gerakan Tarbiyah. Gerakan Tarbiyah sendiri awalnya lebih berfokus sebagai gerakan dakwah yang muncul di awal 1980an di era Orde baru. Gerakan tarbiyah bisa dipahami sebagai alternatif dari berbagai gerakan islam pada saat itu. Islam politik adalah kecenderungan muslim yang aktif

di sektor politik dengan membawa aspirasi agamanya (Qodir, 2013:127).

Gerakan dakwah ini semakin membesar dan mengental dan jaringan mereka pun semakin meluas. Mereka juga berupaya membangun ruh keislaman melalui media tabligh, seminar, aktivitas sosial, ekonomi, dan juga pendidikan, meskipun saat itu berada dalam bayang-bayang kekuasaan orde baru yang demikian ketat mengawasi aktivitas keagamaan (Setiawan dan Nainggolan, 2004:301).

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam AD/ART PKS pasal 5 tentang visi PKS adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pasal 6 tentang misi PKS yaitu menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridhai Allah Subhanahu Wata'ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PKS bertujuan untuk membentuk masyarakat madani yang berbasis Islam (*religious-based civil society*), yang memungkinkan bagi umat beragama untuk menghadirkan *rahmatan lil alamin*. PKS menawarkan gagasan obyektivitas

nilai-nilai Islam, yaitu transformasi ideologi dari wilayah personal-subjektif ke dalam publik-objektif (Qodir, 2013:149).

PKS sebagai Partai Dakwah akan berjuang secara konstitusional, baik dalam lingkup kultural maupun struktural, dengan memaksimalkan peran berpolitiknya demi terwujudnya Masyarakat Madani dalam bingkai NKRI. Caranya, dengan mempercepat realisasi target PK Sejahtera dari “partai kader” menjadi “partai kader berbasis massa yang kokoh”, agar dapat memberdayakan komponen mayoritas bangsa Indonesia, yaitu kalangan perempuan, generasi muda, petani, buruh, nelayan dan pedagang. Melalui musyarakah (partisipasi politik) yang aktif seperti itu akan hadir pemimpin negeri serta wakil rakyat yang betul-betul bersih, peduli dan profesional, sehingga bangsa dan rakyat Indonesia dapat menikmati karunia Allah berwujud NKRI yang maju dan makmur. Partisipasi politik secara sinergis dapat merealisasikan tugas ibadah, fungsi khalifah dan memakmurkan kehidupan, sehingga tampil kekuatan baru untuk membangun Indonesia menjadi negeri yang religius, sejahtera, aman, adil, berdaulat dan bermartabat (<http://www.pks.or.id/content/visi-dan-misi> pada 12 Maret 2016).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai prinsip bahwa Islam adalah sistem hidup yang universal, menyangkup

seluruh aspek kehidupan. PKS berkeyakinan dan ingin menegaskan bahwa secara intelektual-subjektif aktivitas politik adalah ibadah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat didasarkan pada niat yang ikhlas untuk mencapai tujuan nasional. Islam menjadi pergerakan PKS yang substansi moralitas perjuangannya adalah bersih, peduli dan profesional (Aminuddin, 2008:33).

b. Asas Partai Politik

Asas Partai Keadilan Sejahtera adalah Islam

c. Tujuan

Tujuan didirikannya Partai Keadilan Sejahtera, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar PK Sejahtera pasal 5, yaitu:

- (1) Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; dan
- (2) Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridloi Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Usaha

Untuk mencapai tujuan tersebut diusahakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Membebaskan Bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman.
- b) Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami.
- c) Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema dan tuntutan masa mendatang.
- d) Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- e) Membangun Negara Indonesia baru yang adil, sejahtera, dan berwibawa.

e. Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan partai dirumuskan sasaran-sasaran pencapaiannya sebagaimana diamanatkan dalam Falsafah Dasar Perjuangan Partai, Kebijakan Dasar Partai, dan Platform Kebijakan Pembangunan Partai, serta Rencana Strategis Partai, yaitu :

- a) Terselenggaranya pembinaan kepribadian insani atas dasar keseimbangan iman dan materi dalam upaya membentuk karakter bangsa dan peradaban manusia
- b) Terbinanya kualitas anggota, baik dalam skala individu, keluarga, komunitas kerja, maupun profesi
- c) Tersedianya anggota sebagai kader-kader terbaik calon pemimpin bangsa

- d) Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, transparan, akuntabel, bermartabat, dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia.
- e) Terumuskannya alternatif solusi atas problematika bangsa dan negara.
- f) Terjaminnya kelestarian khazanah sumber daya bangsa dan negara.
- g) Tercapainya pemberantasan kebodohan, pengentasan kemiskinan, penanggulangan kerusakan moral, penegakan keadilan, dan pemerataan kesejahteraan.
- h) Terjaminnya penegakan hak asasi manusia
- i) Terpeliharanya ketertiban, ketentraman, dan solidaritas sosial.
- j) Terbentuknya generasi penerus yang lebih baik

f. Sarana dan Prasarana

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran partai menggunakan cara, sarana dan prasarana yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan kemaslahatan umum antara lain:

- a) Seluruh sarana dan manajemen politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Iptek yang dapat mengarahkan dan mengatur kehidupan masyarakat serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahannya.
- b) Ikut serta dalam lembaga-lembaga pemerintahan, badan-badan penentu kebijakan, hukum dan perundang-undangan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.
- c) Menggalakkan dialog konstruktif disertai argumentasi yang kuat dengan semua kekuatan politik dan sosial.
- d) Aktif berpartisipasi dalam berbagai lembaga dan organisasi serta yayasan yang sesuai dengan tujuan partai

g. Makna Lambang Partai Keadilan Sejahtera

Lambang Partai Keadilan Sejahtera mempunyai makna dan landasan filosofi yang dalam, lambang yang dimiliki PKS mempunyai makna secara umum yaitu menegakkan kebenaran nilai-nilai berdasarkan pada kebenaran, persaudaraan, dan persatuan menuju kegemilangan dan kejayaan umat bangsa.



Gambar 1. Partai Keadilan Sejahtera

Arti lambang Partai Keadilan Sejahtera yaitu :

- 1) Kotak persegi empat melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah.
- 2) Ka'bah melambangkan kesatuan umat
- 3) Bulan sabit melambangkan kejayaan, dimensi waktu, keindahan, pencerahan, dan kesinambungan sejarah.
- 4) Untaian 17 (tujuhbelas) butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan adil, ukhuwah, istikamah, berani, disiplin, dalam menjalankan tugas, secara tegas, dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
- 5) Warna putih melambangkan bersih, suci, dan mulia
- 6) Warna hitam melambangkan kepastian, aspiratif, dan akomodatif.
- 7) Warna kuning emas melambangkan kecermelangan, kebahagiaan, dan kejayaan.
- 8) PKS dengan warna hitam, singkatan dari Partai Keadilan Sejahtera.

5. Gerakan Dakwah

Dakwah merupakan aktivitas yang begitu lekat dengan kehidupan muslimin, begitu dekatnya sehingga hampir seluruh lapisan masyarakat terlibat di dalamnya (Abdul ‘Aziz, 2011:5). Pengertian dakwah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai berikut: 1) Penyiaran, propaganda, 2) Penyiaran agama di kalangan masyarakat dan pengembangannya, seruan untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama.

Secara umum definisi dakwah, berdasarkan Al-Qur’an surat An-Nahl 125, yaitu :

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari Jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menurut Sayyid Quthb, Dakwah berasal dari kata “*Da’aa*” berarti memanggil dan meminta untuk menerima ajakan itu, “*Minhaa jud-dakwah*” adalah strategi atau konsep yang terorganisir dan jelas yang harus dipakai oleh para da’i kepada Allah SWT

dalam banyak tempat dan saat untuk menuju pada suatu titik sasaran dan akan tercapai apa yang dicita-citakan (Syabib, 2001:17).

Menurut Sayyid Mutawakkil yang dibahasakan Ali Ibnu Shalih Al-Murshid yang menekankan definisi dakwah pada pengorganisasian dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam melakukan berbagai petunjuk ajaran Islam, menegakkan norma sosial budaya (*ma'ruf*), dan membebaskan kehidupan manusia dari berbagai penyakit sosial (*munkar*) bahwa dakwah adalah mengorganisasikan kehidupan manusia dalam menjalankan kebaikan, menunjukkannya ke jalan yang benar dengan menegakkan norma sosial, budaya, dan menghindarkan dari penyakit sosial (Abidin, 2013:119).

Dakwah adalah kewajiban untuk berusaha ber-*amar ma'ruf nahi munkar* dengan menyampaikan pesan Islam untuk mengimani Allah, agar senantiasa melaksanakan perintahNya dan menjauhi semua laranganNya. Sebagaimana firman dalam Q.S. Ali Imran:104,

“Dan hendaklah di antara kamu ada golongan yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Gerakan Dakwah di Indonesia semakin populer semenjak partai Masyumi berhasil mendapatkan dukungan yang sangat

signifikan. Gerakan dakwah ini sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul sekitar 1442 tahun silam untuk menyerukan, memperjuangkan dan mengajarkan agama Islam sesuai apa yang ada di Al-Qur'an. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu bersifat elastis, akomodatif, dan fleksibel, sehingga dalam hal-hal tertentu ia dapat mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan manusia. Dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang agama, namun juga bertujuan untuk menuntun manusia agar hidup sesuai dengan fitrahnya yang berpedoman pada Al-Qura'an.

Sabda Rasulullah SAW, *“Barang siapa dari kamu sekalian melihat suatu kemunkaran, hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya (dengan kekuatan atau kekuasaan). Jika tidak mampu (karena tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan), cegahlah dengan lidahnya (berupa teguran nasihat baik dengan lisan maupun melalui tulisan. Jika (pun) masih merasa tidak sanggup demikian (karena merasa serba lemah), cegahlah dengan hatinya, dan yang (terakhir) inilah tanda selemah-lemahnya iman.”*

Menurut Jamaludiin Kafei (dalam Abidin, 2013:116), tujuan dakwah dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu.

- a) Tujuan utama, yaitu memasyarakatkan akhlak dan mengakhilkan masyarakat sesuai dengan misi Nabi Muhammad SAW. Akhlak akan menjadi landasan memimpin dalam tiga fungsi besar psikis manusia yaitu berfikir,

- berkehendak, dan perasaan. Akhlak seseorang akan membentuk akhlak masyarakat, negara, dan umat seluruhnya.
- b) Tujuan hakiki, yaitu mengajak manusia untuk mengenal Tuhan dan memercayai-Nya, sekaligus mengikuti jalan petunjuk-Nya.
 - c) Tujuan umum, yaitu menyeru manusia agar mengindahkan seruan Allah dan Rasul-Nya serta memenuhi panggilan-Nya dalam hal yang dapat memberikan kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat kelak.
 - d) Tujuan khusus, yaitu berusaha membentuk satu tatanan masyarakat Islam yang utuh *fi as-silmi kaffah*.

Gerakan dakwah yaitu sebuah upaya yang mengajak segmen masyarakat untuk melakukan perbaikan kualitas hidup menuju ke tingkat yang lebih tinggi dalam kemajuan manusia. Untuk tujuan itu gerakan dakwah harus memiliki kejelasan agenda dan program-program reformasinya. Agenda dan program tersebut kemudian di perjuangkannya melalui pihak yang berkepentingan (Abu Ridha, 2004:51).

Yang dimaksud dengan Gerakan Dakwah Masa Depan yaitu sebuah aktivitas massal dalam format amal jama'i yang memiliki konsep ideologi yang mapan (*al-imanul 'amiq*), pemimpin yang berpegang teguh pada prinsip, teliti dalam segala hal, tidak tertipu oleh kilauan dunia (*smart leader*), organisasi yang rapih dan solid (*at-tanzhim ad-daqiq*) program dakwah yang komprehensif, seimbang dan berkelanjutan (*al-'amal al-mutawashil*), serta sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi dalam berbagai keahlian. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa Gerakan

Dakwah Masa Depan adalah yang memiliki lima karakteristik utama berikut :

- a. Yang memiliki konsep ideologi dan pemikiran yang mapan dan kuat sehingga ada jaminan kebenaran dan kekuatannya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. Di samping itu, ideologi dan pemikiran tersebut menjadi motor dan sekaligus *framework* semua aktivitas organisasi.
- b. Yang memiliki *smart leader* dalam berbagai tingkatan struktural organisasi, atau paling tidak dalam jajaran tertinggi organisasi. Mereka adalah para pemimpin yang berpegang teguh pada prinsip, memiliki ilmu yang mendalam tentang Islam dan manajemen SDM, teliti dalam segala hal, tidak tertipu oleh kilauan dunia serta menjadi contoh tauladan dalam segala sisi kehidupan. Dengan demikian, dunia teori, pemikiran, ide, gagasan, konsep dan nilai akan menjadi sesuatu yang mudah dan praktis sehingga terjadi proses transformasi ilmu, spiritualitas (*ruhiyyah*) dan keteladanan dalam kehidupan nyata.
- c. Yang memiliki sistem dan aturan main yang adil dan natural sesuai dengan prinsip-prinsip ideologi organisasi dalam Islam. Dengan demikian, organisasi akan menjadi sebuah payung amal (aktivitas) dakwah yang dimiliki bersama, tidak ada yang berhak memperlakukannya seakan milik pemimpin atau sekelompok elite organisasi. Kepemilikan tersebut lahir dari rasa kepemilikan (*sense of belongings*) dari dalam hati sanubari setiap anggotanya. Bila rasa kepemilikan tersebut lahir dari lubuk hati yang dalam setiap anggotanya, maka tidak diragukan mereka akan berhasil membangun sebuah organisasi yang solid.
- d. Yang memiliki program dakwah yang komprehensif, seimbang dan berkelanjutan sesuai dengan strategi dan perencanaan jangka panjang.
- e. Yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, khususnya mereka yang menjadi pemimpin formal dan informal sehingga menjadi referensi dalam bidang masing-masing, teori dan prakteknya, baik tingkat daerah, nasional maupun global. Bila dicermati dengan baik, ketika berbagai gerakan dakwah muncul di berbagai wilayah negeri Muslim di awal abad ke 20 seperti yang disinggung di atas, hampir seluruh kawasan Islam sedang dijajah kaum kolonialis Eropa. Mayoritas umat Islam berhasil dijauhkan dari nilai-nilai Islam akibat dahsyatnya *al-ghazwu al-Fikri* (invasi pemikiran) yang dilancarkan kaum penjajah Eropa terhadap mereka. Bahkan di sebagian kawasan, kaum kolonialis menciptakan berbagai aliran yang menggoyang sendi-sendi dasar ajaran Islam dari dalam tubuh umat Islam sendiri, seperti yang dilakukan Inggris di Sub Continent dengan mengorbitkan Mirza Ghulam Ahmad

sebagai Nabi yang menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai nabi Allah terakhir. Aneh bin ajaib, aliran ini masih saja banyak peminat dan pembelanya, khususnya di negeri ini. Suatu hal yang perlu kita syukuri bahwa *marhalah ta'rif (nasyrul fikroh)* yakni, fase penyebaran nilai-nilai yang dilakukan berbagai gerakan dakwah sejak awal abad 20 yang mereka lakukan dengan gigih dan ikhlas sudah memperlihatkan hasil yang sangat mengembirakan. (sumber : www.eramuslim.com pada 5 Januari 2016)

Politik pada hakikatnya merupakan bagian dari dakwah yang merupakan suatu tindakan mempengaruhi manusia mengikuti Islam. Kegiatan politik merupakan bagian dari kegiatan dakwah. Disisi lain jamaah dan partai tidak ada perbedaan yang substantive. Keduanya merupakan sarana berdakwah, sarana beramar *ma'ruf* dan *nahi mungkar*. Dakwah harus di kemas sedemikian rupa di era modern ini yaitu kehidupan sosial yang di tandai dengan teknologi komputer dan dunia maya. Beberapa cara untuk menumbuhkan aktivitas politik yang berhasil, antara lain melalui (Abu Ridha, 2004:51) :

- a. Melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan *nasyrul fikrah* (sosialisasi ide atau gagasan). Tentu saja pendekatan ini harus melibatkan bidang publikasi dan informasi yang luas dan intensif. Dapat di katakan keberhasilan-keberhasilan 'amalsiyasi selanjutnya sangat di tentukan oleh sejauh mana gerakan dakwah memperoleh kesuksesan dalam masalah publikasi ini. Sebab, jagat siasah sering dilukiskan sebagai jagat komunikasi. Tentu yang dimohon oleh Nabi Musa a.s agar dibebaskan dari belenggu yang mengikat lidahnya sehingga tidak mampu berkomunikasi secara baik adalah sesuatu yang penting dalam jagat siasah. Sedangkan ukuran keberhasilan komunikasi terletak pada pemahaman konstituen atau rakyat bahkan lawan ideologinya terhadap gagasan-gagasan yang disampaikannya.
- b. Mengembangkan sikap kritis di tengah-tengah para pendukung atau konstituen terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mereka. Di sini setiap gerakan Islam harus

mampu melakukan pendidikan siasah secara luas terhadap rakyat sehingga menjadi masyarakat yang secara siasah berdaya, tidak hanya dipatronasi oleh penguasa. Indikator sebuah masyarakat yang berdaya terlihat pada kemampuan mereka dalam melakukan koreksi terhadap pemerintah. Keberdayaan masyarakat secara siasah inilah yang sesungguhnya menjadi inti sebuah masyarakat madani. Pembentukan komisi-komisi seperti komisi undang-undang dasar dan penyampaian rekomendasi-rekomendasi. Sebagai tindak lanjut dari pengembangan sikap kritis warga ialah melakukan kanalisasi terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang berwenang. Untuk kepentingan ini gerakan dakwah hendaknya menyusun komisi-komisi yang melakukan pemantauan terhadap kebijakan dan jalannya pemerintah, juga melakukan kajian terhadap undang-undang, apakah masih relevan dengan tantangan yang ada atau sudah harus di amandemen. Komisi-komisi ini juga sangat bermanfaat sebagai persiapan mendudukan kader-kader dakwah dalam badan-badan pemerintahan bila datang kesempatan untuk itu.

- c. Melakukan persiapan dan penyusunan agenda dan program dalam rangka melancarkan proyek reformasi. Reformasi (*ishlah*) menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah gerakan dakwah, yaitu: sebuah upaya yang mengajak segmen masyarakat untuk melakukan perbaikan kualitas hidup menuju ke tingkat yang lebih tinggi dalam kemajuan manusia. Untuk tujuan itu gerakan dakwah harus memiliki kejelasan agenda dan program-program reformasinya. Agenda dan program tersebut kemudian di perjuangkannya melalui pihak yang berkepentingan.
- d. Melancarkan statemen-statemen siasah yang menjadi sikap resmi gerakan atau partai. Statemen-statemen yang dikeluarkan biasanya melalui juru bicara atau para pemimpinnya langsung, merupakan sikap yang diambil oleh gerakan dalam isu-isu tertentu. Sikap itu merupakan cerminan ideologi dan cita-cita siasah yang sedang diperjuangkannya. Statemen yang dikeluarkan bisa jadi bersifat dukungan atau penolakan, bisa bersifat imbauan atau bahkan mobilisasi opini untuk selanjutnya diarahkan untuk tujuan siasah tertentu.
- e. Aktif mengikuti kegiatan-kegiatan badan legislatif, baik dalam pelaksanaan fungsi legislasi ataupun dalam pelaksanaan fungsi kontrolnya. Untuk itu gerakan dakwah harus mengakrabkan dirinya dalam mengikuti sidang-sidang yang diselenggarakan badan legislatif, baik di tingkat daerah, propinsi ataupun pusat. Dengan itu gerakan dakwah selalu mengikuti perkembangan

konstitus dan dengan itu pula diharapkan dapat tumbuh kader-kader yang siap berjuang melalui parlemen.

- f. Pembentukan partai atau ikut serta dalam sebuah partai dalam memperjuangkan kepentingan siasah. Pada umumnya partai diidentifikasi sebagai organisasi yang menghimpun kelompok individu yang memiliki kesamaan konsep tentang beberapa masalah siasah dan membentuk satu pandangan yang efektif. Melalui keberadaan partai ini gerakan dakwah dapat leluasa melancarkan dakwahnya di lembaga-lembaga strategis, baik eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif.
- g. Pengajuan tuntutan-tuntutan siasah. Gerakan dakwah seyogyanya memiliki sikap siasah yang jelas dalam setiap menghadapi isu-isu siasah yang berkembang. Oleh karena itu, ia harus konsern dalam membentuk sikap siasah kepada para pendukungnya, ia harus siap menjadi mediator segala bentuk tuntutan siasah rakyat, ia harus siap pula menjadi alat efektif dalam menyosialisasikan gagasan dan cita-cita siasah gerakannya dan menjadi alat perjuangan dalam melakukan tuntutan-tuntutan siasah nya.
- h. Membangun aliansi siasah. Uslub lain yang mungkin dilakukan oleh gerakan Islam dengan perjuangan siasahnya adalah melakukan aliansi dengan kekuatan-kekuatan lain untuk mencapai tujuan-tujuan siasah tertentu. Aliansi siasah adalah istilah yang biasa digunakan untuk para aktivis partai sebagai bagian dari cara atau strategi dalam memenangkan perjuangan dan mewujudkan cita-cita siasahnya. Biasanya sebuah aliansi dilakukan oleh partai-partai untuk tujuan tertentu dengan tetap memelihara eksistensinya. Kerja sama yang erat di cerminkan dalam kepengurusan, program, dan tujuan bersama. Mirip dengan aliansi adalah koalisi. Hanya saja umumnya koalisis dilakukan dalam membentuk pemerintahan bersama. Dalam aliansi, hal itu biasanya dapat dihindari.
- i. Keterlibatan langsung dalam proses kebijakan siasah, baik dalam eksekutif ataupun dalam legislatif. Kemungkinan lain yang akan dihadapi gerakan dakwah yang telah memasuki wilayah siasah adalah di tuntutan untuk melakukan *musyarakah siyasiyah* yaitu keikutsertaan dari jamaah melakukan pengambilan keputusan umum di lembaga-lembaga politik formal maupun informal, di tingkat nasional atau daerah beserta seluruh aktivitas yang mengikutinya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktivitas politik lainnya .

B. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan

Penelitian dan pustaka yang berkaitan dengan kemunculan Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut :

Tabel 2. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Relevan

No	Nama Penulis	Judul	Fokus
1	Ach. Basyir	Skripsi “Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatisme”	PKS yang berideologi Islam cenderung mengangkat isu populis untuk kepentingan politik praktis daripada nilai ideologi yang dimilikinya. Dimana yang dulunya PKS merupakan partai yang berbasis Islam kini berubah menjadi partai yang berideologi nasionalis. Hal tersebut terjadi karena adanya kepentingan partai politik yang pragmatis serta merupakan upaya untuk mendapatkan kekuasaan.
2	M. Iqbal Habibie	Skripsi “Upaya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Rekrutmen Pemilih Pemula di	difokuskan pada pelaksanaan rekrutmen anggota pemilih pemula atau anggota baru yang dilakukan Partai Keadilan

		Kabupaten Tegal”	Sejahtera (PKS) berciri dan bersifat keagamaan. Pelaksanaan rekrutmen dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti, pelatihan-pelatihan, pengajian, seminar, dauroh, dialog, dan pertemuan lainnya, namun pendekatan yang lebih ditekankan adalah pendekatan personal, hal ini untuk menguatkan komunikasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada masyarakat.
3	Akbar Sandro Yudho D	Tesis “Sistem Pengkaderan di Kalangan Partai Islam (Studi Tentang Tarbiyah PKS di Yogyakarta)”	fokus pada penelitian ini adalah tentang sistem pengkaderan yang dilakukan PKS adalah Tarbiyah.
4	Arsyaddi	Tesis “Dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Melalui Kaderisasi”	Fokus dalam penelitian ini adalah proses kaderisasi yang ada di PKS dengan gerakan tarbiyah.

Penelitian ini berbeda dengan pdengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada kaderisasi yang

dilakukan oleh PKS melalui gerakan dakwah yang dilakukan oleh DPW PKS Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk kader kader yang solid.

C. Kerangka Berfikir

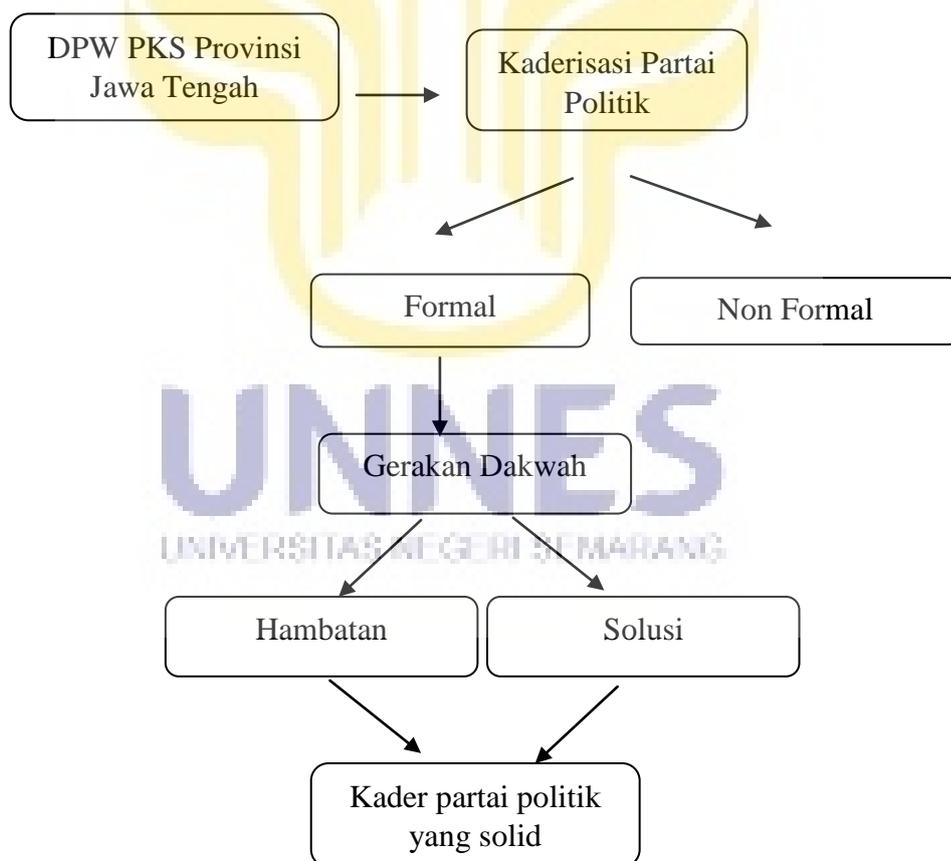
Partai Keadilan Sejahtera yang disingkat PKS merupakan partai berasaskan Islam yang pendiriannya terkait dengan pertumbuhan aktivitas dakwah Islam semenjak awal tahun delapan puluhan. PKS didirikan tanggal 20 April 2002 merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan yang didirikan di Jakarta pada tanggal 20 juli 1998.

Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu partai politik yang ada di Indonesi. Partai politik sebagai jembatan demokrasi antara pemerintah dengan yang diperintah yaitu rakyat, partai politik mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai sarana pendidikan politik, sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik. Sebagai partai politik pastinya menjalankan salah satu fungsinya yaitu rekrutmen politik ataupun kaderisasi yang merupakan proses penyeleksian untuk menyiapkan kader politik yang layak menduduki jabatan-jabatan politik baik di dalam atau di luar partai (eksekutif dan legislatif) berupa jabatan administratif maupun politik yang berdasarkan kemampuan, kinerja, bakat serta pengalaman dari kader tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor partisipasi kaum muslimin, ulama, tokoh masyarakat dan intelektual.

Sehingga hal ini dapat diteliti, yaitu bagaimanakah sistem kaderisasi yang dilakukan oleh DPW PKS Provinsi Jawa Tengah melalui

gerakan dakwahnya pada kadernya sehingga menghasilkan kader yang berkualitas dan solid terhadap partainya. yang tidak saja dapat dinilai oleh partai sendiri tetapi juga pada masyarakat untuk posisi jabatan publik, dan juga pada Islam yang menjadi asas dari PKS. Kemudian hal apa saja kendala dalam proses kaderisasi yang dilakukan oleh PKS di tengah ketatnya kompetisi elektoral dalam memperluas basis massa, serta solusi apa yang dilakukan DPW PKS Provinsi Jawa Tengah untuk menghadapi kendala dalam sistem kaderisasi tersebut.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam bagan berikut :



Bagan 1. Skema Kerangka Pikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu partai politik menjalankan salah satu fungsi partai politik yaitu sebagai sarana rekrutmen politik dan kaderisasi, kepada kader yang telah menjadi anggota partai. Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai politik yang menyatakan diri sebagai partai dakwah, hal ini sebagaimana juga diterapkan dalam proses kaderisasinya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berciri dan bersifat keagamaan pelaksanaan kaderisasinya dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang biasanya berhubungan partai, yaitu dengan pelatihan-pelatihan, pengajian, ta'lim rutin, berkemah, seminar, dauroh, serta pertemuan lainnya. Kaderisasi yang dilakukan oleh DPW PKS Provinsi Jawa Tengah melalui jalur formal dan informal. Secara formal pengkaderan partai PKS yaitu dilakukan secara resmi oleh kepengurusan partai dari ranting sampai pusat, pengkaderan formal ini merupakan sarana pembinaan kader sekaligus perjenjangan bagi mereka yang akan berimplikasi pada distribusi peran dan posisi struktural di PKS.
2. Kendala yang dihadapi oleh DPW PKS Provinsi Jawa Tengah dalam kaderisasi antara lain, faktor yang berasal dari internal partai yaitu kurangnya sumber daya manusia dan terbatasnya sumber dana dan

anggaran, kemudian faktor kendala eksternalnya adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai Islam.

3. Solusi yang dilakukan oleh DPW PKS Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan kaderisasi yaitu pertama, DPW PKS Provinsi Jawa Tengah solusi yang dilakukan untuk menghadapi hambatan dalam kaderisasi yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan program-program yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kedua, meningkatkan pelatihan dan peningkatan kualitas kader, melakukan pendekatan dan pelatihan dengan masyarakat setempat dan membangun komunikasi dengan semua golongan atau kelompok masyarakat, dan dibuktikan dengan kerja dan kegiatan agar masyarakat percaya terhadap partai politik terutama sebagai partai islam dengan terus menjaga citra baik partai sebagai partai da'wah. Ketiga, dalam upaya mengatasi terbatasnya dana dengan menggabungkan beberapa kegiatan menjadi satu agar semua kegiatan tetap berjalan dengan efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya partai politik selalu terbuka dengan masyarakat dan selalu menjalin komunikasi yang baik untuk meminimalisir kecurigaan-kecurigaan maupun ketidakpercayaan masyarakat dengan partai politik.

2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) senantiasa bersikap profesional dalam berbagai bidang yang ditekuni terutama meningkatkan peran dan fungsinya sebagai partai politik, meningkatkan kualitas para kader, serta memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menjadi anggota partai agar bisa berpartisipasi aktif dalam dunia politik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Jum'ah Amin. 2011. *FIQIH DAKWAH: Prinsip dan Kaidah Asasi Dakwah Islam*. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia
- Abidin, Yusuf Zainal. 2013. *Pengantar Retorika*. Bandung: Pustaka Setia
- Assiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Bandung : Gramedia Pustaka
- Edward, Djony. 2006. *Efek Bola Salju PKS*. Bandung : PT. Syaamil Cipta Media
- I ketut Putra Erawan, Riswanda Imawan dkk. 2010. *Draft Modul Organisasi dan Manajemen Kepartaian: Bab I Manajemen Sumberdaya Manusia Politik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Fadilla, Putra. 2003. *Kumpulan Materi*. Jakarta:Private
- Firmansyah. 2008. *Memahami Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Politik Di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik (komunikasi dan positioning ideologi politik diera demokrasi)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Imamadun, Rahmat. 2008. *Ideologi Politik PKS*. Yogyakarta: LKIS
- Kantaprawira, Rusadi. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kamarudin. 2003. *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi Refleksi Pemilu 1999 Untuk Pemilu 2004*. Jakarta: Versi Publishing.
- Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Komarudin, Sahid. 2011. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuh, Muhammad. 2009. *Gerakan Dakwah: Antara Harapan dan Tantangan (1)*. www.eramuslim.com (5 Januari 2016)
- Pito, Efriza dkk. 2005. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Depok
- Ridha,Abu. 2004. *'Amal Siyasi* . Bandung : PT. Syamil Cipta Media

- Setiawan, Nainggolan. 2004. *Partai-partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Subiyanto, Ibnu. 2014. *Pemimpin Berkaki Rakyat Membangun Parpol Berbasis Kader*. Yogyakarta: Galang Pustaka
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Syabib, Jamaluddin. 2001. *Manhaj Harakah & Dakwah menurut Sayyid Quthb*. Jakarta : Pilar Press
- Tamara, Roni. 2014. *SISTEM KADERISASI DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMILU 2009 (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara)*. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2014, 2 (1) : 1829-1841
- Qodir, Zuly. 2013. *HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia*. Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government

Dokumen-Dokumen:

Al-Qur'an

AD/ART Partai Keadilan Sosial

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Falsafah Dasar Perjuangan Dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera